

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 pada Bab IX menyatakan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan, sarana dan prasarana, produksi hortikultura, pasca panen, pemasaran, dan penyebaran informasi.
2. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang produksi tanaman pangan, sarana dan prasarana, produksi hortikultura, pasca panen, pemasaran, dan penyebaran informasi.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang produksi tanaman pangan, sarana dan prasarana, produksi hortikultura, pasca panen, pemasaran, dan penyebaran informasi.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun tersebut.

Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini dilakukan melalui pendekatan sinergitas perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis. Dalam menyusun Renja Tahun 2016 ini, senantiasa mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga isu-isu strategis nasional, serta arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

Penetapan target dan sasaran pencapaian kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi Renja Kabupaten/Kota, dan juga kebijakan dalam Renja Kementerian/Lembaga terkait.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dimana terdapat perubahan alokasi anggaran dan penambahan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung, antara lain:

- Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9437).
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2005.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2016 Tanggal 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
 - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4001/DISTPH Tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah :

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga yang menangani tanaman pangan dan hortikultura baik di Pusat maupun di kabupaten/kota.
3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan memuat antara lain:

- *Latar Belakang*, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Selatan 2016, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra.

- *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
- *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 (Tahun 2015) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2016)

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Bab ini membahas tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 beserta perubahannya. Bab ini memuat:

- *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

- *Tujuan dan Sasaran Renja SKPD*, memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- *Program dan Kegiatan*, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai perubahan program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, serta perubahan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Gambaran pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu diukur dengan melibatkan instansi terkait maupun indikator mikro yang dicapai dari penyelenggaraan atas masing-masing kegiatan. Adanya penghargaan yang diterima merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kinerja yang dicapai.

Pada Renstra 2013 – 2018, **Visi** Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan adalah **Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Penyedia Pangan Nasional Berkelanjutan dan Berdaya Saing**. Sulawesi Selatan sebagai pilar utama penyedia pangan nasional dimaksudkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki berusaha mempertahankan dan memantapkan peran Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan dan Provinsi Penyelamat Pangan Nasional. Indikator keberhasilannya adalah :

- Pencapaian surplus beras 2 juta ton pada tahun 2012 akan dilanjutkan dengan peningkatan produksi Padi 6% per tahun sehingga surplus beras menjadi 3 juta ton pada tahun 2018, dengan demikian

menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memberikan kontribusi surplus beras terbesar secara nasional.

- Peningkatan produksi Jagung dan komoditas utama tanaman pangan lainnya sehingga pencapaian produksinya minimal berada pada peringkat 7 besar secara nasional.
- Meningkatnya pelayanan terhadap petani sebagai pelaku utama dan pelaku agribisnis lainnya mulai dari penyediaan sarana produksi sampai dengan pemasaran hasil.
- Meningkatnya pengembangan dan produksi komoditas unggulan hortikultura dari tahun ke tahun minimal 1% per tahun selama periode 2013 – 2018.

Berkelanjutan dimaksudkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proses produksi pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh petani secara partisipatif, terutama setelah berakhirnya dukungan / bantuan pemerintah dengan tetap memperhatikan implikasi terhadap kerusakan lingkungan yang seminimal mungkin.

Berdaya saing dimaksudkan bahwa produk pangan pokok yang dihasilkan mampu memiliki daya saing yang tinggi terhadap permintaan pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas tersebut, ditetapkan **Misi** atas upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dalam rangka swasembada berkelanjutan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas serta pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.
3. Mendorong optimalisasi penggunaan lahan, air, dan sarana produksi untuk berproduksi.
4. Mendorong berkembangnya system agribisnis dan agroindustry pangan pokok.

5. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Gambaran pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu diukur dengan melibatkan instansi terkait maupun indikator mikro yang dicapai dari penyelenggaraan atas masing-masing kegiatan. Adanya penghargaan yang diterima merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kinerja yang dicapai.

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 digambarkan melalui pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan pada Renstra. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan yang diuraikan melalui pencapaian target dan sasaran tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2016			
					K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) RENJA	Rp (Ribu) DPA	I		II	
												K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9	
	2	Urusan Pilihan													
	2.01	Pertanian				662.279.026		242.376.672		145.263.826	136.981.998		0		0
I	Administrasi keuangan yang akuntabel	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.744.922		1.443.916		1.750.000	1.639.900		0		0
		Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Keuangan	Administrasi keuangan yang akuntabel	laporan	Penataan administrasi keuangan yang akuntabel selama 5 tahun	6.744.922		1.443.916	Administrasi keuangan yang akuntabel selama 2 tahun (24 laporan)	1.750.000	1.639.900	3 laporan bulanan (3 bulan)	0	-	0
II	Pemenuhan prasarana dan sarana aparatur	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD				72.186.129		22.541.921		15.300.000	14.521.254		0		0
	1	Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Aparatur	Tersedia prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan	laporan	Tersedia prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan selama 5 tahun	16.965.117		3.886.728	Tersedia prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan oleh aparatur dinas selama 2 tahun (24 laporan)	4.000.000	3.665.120	3 laporan bulanan (3 bulan)	0	-	0
	2	Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana SKPD/UPTD	Penyediaan dan perbaikan pada prasarana dan sarana kantor dinas dan UPTD	laporan	Penyediaan dan perbaikan pada prasarana dan sarana kantor dinas dan UPTD selama 5 tahun	31.888.083		12.939.179	Penyediaan dan perbaikan pada prasarana dan sarana kantor Dinas dan UPTD selama 2 tahun (24 laporan)	6.000.000	5.509.180	3 laporan bulanan (3 bulan)	0	-	0
	3	Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Pertanian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Administrasi perkantoran dan kepegawaian	laporan	Administrasi perkantoran dan kepegawaian selama 5 tahun	23.332.929		5.716.014	Administrasi perkantoran dan kepegawaian selama 2 tahun (24 laporan)	5.300.000	5.346.954	3 laporan bulanan (3 bulan)	0	-	0
III	Perancangan Program SKPD dan Monitoring dan	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja				7.400.895		1.733.254		1.750.000	1.771.101		0		0
	1	Evaluasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Program dan Monitoring Evaluasi Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedia dokumen penganggaran Renja, DPA, Ropak, Lakip, laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan	Dokumen	Tersedia dokumen penganggaran Renja, DPA, Ropak, Lakip, laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan selama 5 tahun	7.400.895		1.733.254	Tersedia dokumen penganggaran Renja, DPA, Ropak, Lakip, laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan selama 2 tahun	1.750.000	1.771.101	Dokumen DPA, Ropak, Lakip, laporan bulanan (3 bulan), laporan triwulan I	0	-	0

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (lanjutan.....)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2016			
					K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) RENJA	Rp (Ribu) DPA	I		II	
												K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9	
IV	Peningkatan kapasitas produksi komoditas	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				182.402.537		69.614.681		36.200.000	32.945.580		0		0
1	utama tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai)	Kegiatan Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan	Tersedia benih Padi, Jagung, dan Kedelai yang siap diperbanyak pada IKB dan Penangkar Benih	Ton	Tersedia benih Padi, Jagung, dan Kedelai yang siap diperbanyak pada IKB dan Penangkar Benih selama 5 Tahun	14.835.889	Tersedia benih Padi 450 ton, Jagung 50 ton, dan kedelai 20 ton	6.463.149	Tersedia benih Padi 100 Ha, Jagung 20 Ha, dan Kedelai 10 Ha	3.000.000	2.977.450	Persiapan penyediaan benih Padi 100 Ha, Jagung 20 Ha, dan kedelai 10 Ha	0	-	0
2		Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi	Produksi Padi	Ton	Produksi Padi 6.739.078 ton	85.178.565	Angka Tetap BPS Produksi Padi 5.471.807 ton	31.559.342	Produksi Padi 5.997.755 ton	17.000.000	14.620.720	-	0	-	0
			Produktivitas Padi	Kw/Ha	Produktivitas Padi 56,56 Kw/Ha		Angka Tetap BPS Produktivitas Padi 52,41 Kw/Ha		Produktivitas Padi 54,37 Kw/Ha			-		-	
3		Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Serealia	Produksi Jagung	Ton	Produksi Jagung 1.712.886 ton	64.007.430	Angka Tetap BPS Produksi Jagung 1.528.414 ton	26.155.580	Produksi Jagung 1.510.182 ton	12.000.000	11.278.610	-	0	-	0
			Produktivitas Jagung	Kw/Ha	Produktivitas Jagung 50,43 Kw/Ha		Angka Tetap BPS Produktivitas Jagung 51,79 Kw/Ha		Produktivitas Jagung 48,95 Kw/Ha			-		-	
4		Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Lainnya	Produksi Kedelai	Ton	Produksi Kedelai 58.317 ton	18.380.654	Angka Tetap BPS Produksi Kedelai 67.192 ton	5.436.610	Produksi Kedelai 52.895 ton	4.200.000	4.068.800	-	0	-	0
			Produktivitas Kedelai	Kw/Ha	Produktivitas Kedelai 15,91 Kw/Ha		Angka Tetap BPS Produktivitas Kedelai 17,87 Kw/Ha		Produktivitas Kedelai 15,44 Kw/Ha			-		-	
V	Meningkatnya kapasitas produksi	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura				137.109.742		49.382.044		28.050.000	26.169.487		0		0
1	komoditas utama hortikultura	Kegiatan Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	Bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB dan penangkar	Paket	Bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB dan penangkar selama 5 Tahun	10.116.476	Bibit horti bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB dan penangkar selama 2 tahun (2 Paket)	3.727.340	Tersedia benih bermutu komoditas hortikultura mendukung pengembangan hortikultura	2.300.000	2.158.443	Persiapan penyediaan benih bermutu komoditas hortikultura mendukung pengembangan hortikultura	0	-	0

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (lanjutan.....)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2016			
					K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) RENJA	Rp (Ribu) DPA	I		II	
												K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9	
2	Meningkatnya kapasitas produksi komoditas hortikultura	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Serta Pengembangan Tanaman Hias	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Hias	Tangkai	Produksi Tanaman Hias 370.721 tangkai	14.680.859	Angka Tetap BPS produksi tanaman hias 265.732 tangkai	4.596.579	Produksi tanaman hias 490.216 tangkai	3.500.000	3.557.402	-	0	-	0
3	utama hortikultura	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Serta Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka	Produksi Cabe Besar, Cabe Rawit, Bawang Merah, Kentang, dan Tomat	Ton	Cabe Besar 23.969 ton, Cabe Rawit 21.945 ton, Bawang Merah 43.775 ton, Kentang 24.886 ton, dan Tomat 49.420 ton	22.922.450	Angka Sementara BPS Produksi Cabe Besar 22.834,5 ton, Cabe Rawit 22.487,9 ton, Kentang 16.942,5 ton, Bawang Merah 70.291,6 ton dan Tomat 39.215,4 ton	7.340.418	Produksi Cabe Besar 23.497 ton, Cabe Rawit 21.513 ton, Bawang Merah 42.913 ton, Kentang 24.396 ton, dan Tomat 48.446 ton	5.000.000	5.679.413	-	0	-	0
4		Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Serta Pengembangan Tanaman Buah-buahan	Produksi Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa	Ton	Mangga 167.727 ton, Jeruk Manis 15.489 ton, Jeruk Besar 33.398 ton, Pisang 158.231 ton, dan Markisa 12.912 ton	89.389.957	Angka Sementara BPS Produksi Mangga 114.224,3 ton, Jeruk Manis 10.216,9 ton, Jeruk Besar 10.710,5 ton, Pisang 157.065,1 ton, dan Markisa 10.036 ton	33.717.707	Produksi Mangga 164.422 ton, Jeruk Manis 15.184 ton, Jeruk Besar 32.739 ton, Pisang 155.113 ton, dan Markisa 12.657 ton	17.250.000	14.774.230	-	0	-	0
VI	Penurunan tingkat kehilangan hasil pada saat panen, peningkatan	Program Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengembangan Agribisnis, dan Penyebaran Informasi				58.968.984		19.860.655		12.663.826	10.328.275		0		0
1	n nilai tambah dan daya saing produk unggulan, dan peningkatan	Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Kehilangan Hasil Padi dan Jagung	%	Tingkat kehilangan hasil Padi 8,71% dan Jagung 5,75%	17.626.827	Tingkat kehilangan hasil Padi 9,61% dan Jagung 5,20%	5.013.143	Tingkat kehilangan hasil Padi 9,21% dan Jagung 6,25%	4.000.000	3.164.650	-	0	-	0
			Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif /kelompok SL PUA	Kelompok SL PUA	100 kelompok SL PUA							-		-	
2	pemasaran beras antar pulau	Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Serta Penyebaran Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Beras yang diantarpulaukan	Ton	Beras yang diantarpulaukan 1.557.574 ton	21.349.436	Beras yang diantarpulaukan 927.551 ton	7.099.425	Beras yang diantarpulaukan 1.287.251 ton	4.663.826	3.259.275	-	0	-	0

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (lanjutan.....)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2016			
					K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) RENJA	Rp (Ribu) DPA	I		II	
												K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9	
3	Penurunan tingkat kehilangan hasil pada saat panen, peningkatan	Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis dan Pembiayaan Usahatani Tanaman Pangan dan	Sosialisasi Kemitraan Usaha Bimbingan pengembangan usaha	Kali Kali	Sosialisasi Kemitraan Usaha 25 kali Bimbingan pengembangan usaha 25 kali	19.992.720	Sosialisasi Kemitraan Usaha 7 kali Bimbingan Pengembangan Usaha 10 kali	7.748.086	Sosialisasi Kemitraan Usaha 4 kali Bimbingan Pengembangan Usaha 4 kali	4.000.000 3.904.350	- -	0 -	- -	0 -	
VII	Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian				165.364.385		65.898.565		32.500.000	40.514.330		0		0
1	tani, alat dan mesin pertanian, serta	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	Ketersediaan jaringan irigasi meningkat	Ha	Ketersediaan jaringan irigasi 90.232 Ha	57.042.847	Ketersediaan jaringan irigasi 354.576 Ha	25.447.000	Ketersediaan jaringan irigasi 81.843 Ha	10.000.000	14.121.200	Persiapan penyediaan jaringan irigasi	0	-	0
	ketersediaan pupuk		Ketersediaan jalan usaha tani meningkat	Paket	Jalan Tani 24 Kab/Kota		Jalan tani 24 Kab/Kota		Jalan tani 22 Kab/Kota			Persiapan penyediaan jalan tani		-	
2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin Pertanian	Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian	Unit	Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian 265.658 unit	62.566.520	Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian 235.690 unit	23.251.071	Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian 243.115 unit	12.500.000	14.502.510	Persiapan fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian	0	-	0
			Kelompok UPJA Pemula, Berkembang, dan Profesional	Kelompok	Kelompok UPJA 489 kelompok		Kelompok UPJA 430 Klp.		Kelompok UPJA 411 kelompok			-		-	
3		Kegiatan Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	Fasilitasi Ketersediaan pupuk	Ton	Fasilitasi ketersediaan pupuk 542.308 ton	45.755.017	Fasilitasi ketersediaan pupuk 455.634,62 ton	17.200.494	Fasilitasi ketersediaan pupuk 496.289 ton	10.000.000	11.890.620	Persiapan fasilitasi ketersediaan pupuk	0	-	0
VIII	Peraturan Daerah yang mendukung	Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan				950.000		200.000		250.000	200.000		0		0
1	g peningkatan produksi berkelanjutan	Kegiatan Regulasi Lahan Berkelanjutan	Jumlah regulasi lahan pangan berkelanjutan (Peraturan Daerah/Perda)	Perda	1 Peraturan Daerah / Perda	950.000	1 Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan	200.000	Sosialisasi Perda alih fungsi lahan	250.000	200.000	-	0	-	0
IX	Penurunan persentase serangan OPT dan DPI, serta	Program Penyediaan Benih Bermutu, Pengendalian OPT dan Statistik Pertanian				31.151.434		11.701.636		6.500.000	5.807.943		0		0
1	peningkatan penggunaan benih bermutu, serta	Kegiatan Peramalan dan Pengendalian Serangan Tanaman (OPT) dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Penurunan Persentase serangan OPT	%	Persentase serangan OPT 4,2%	14.909.041	Persentase serangan OPT 2,38%	6.619.050	Persentase serangan OPT 4,8%	3.000.000	2.512.857	-	0	-	0

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (lanjutan.....)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (Tahun 2015)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2016			
												I		II	
					K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) RENJA	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9	
2	Penurunan persentase serangan OPT dan DPI,	Kegiatan Pengembangan Pengawasan dan Pelayanan Sertifikasi Benih TPH	Penggunaan benih Padi bersertifikat	%	Penggunaan benih Padi bersertifikat 70,68%	11.300.129	Penggunaan benih Padi bersertifikat 65%	3.359.315	Penggunaan benih Padi bersertifikat 66,18%	2.500.000	2.233.249	-	0	-	0
3	peningkatan penggunaan benih	Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Statistik Pertanian	Kualitas pelayanan data dan informasi statistik	%	Kualitas pelayanan data dan informasi statistik 90%	4.942.263	Kualitas pelayanan data dan informasi statistik 74%	1.723.271	Kualitas pelayanan data dan informasi statistik 75%	1.000.000	1.061.837	-	0	-	0
X	Ketersediaan prasarana dan sarana	Program Fasilitas Prasarana dan Sarana Berbantuan				32.400.131		0		10.300.000	3.084.128		0		0
1	berbantuan dalam dan luar negeri	Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Fasilitas Sarana dan Prasarana Berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Paket	5 paket dalam 5 tahun (1 paket per tahun)	31.456.437	Fasilitas Sarana dan Prasarana Berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 Paket	0	Fasilitas Sarana dan Prasarana Berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 Paket	10.000.000	2.533.653	-	0	-	0
2		Kegiatan Fasilitas Kegiatan Berbantuan Loan WISMP	Fasilitas Kegiatan Berbantuan Loan WISMP	Paket	5 paket dalam 5 tahun (1 paket per tahun)	943.693	Fasilitas Kegiatan Berbantuan Loan WISMP 2 Paket	0	Fasilitas Kegiatan Berbantuan Loan WISMP 2 Paket	300.000	550.475	-	0	-	0

Realisasi terhadap sasaran tahun 2015 sebagian besar telah mencapai sesuai yang ditargetkan, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100%. Pencapaian produksi dan produktivitas tanaman pangan utama telah melebihi sasaran yang ditargetkan. Demikian pula dengan produksi dan produktivitas hortikultura.

Produksi 7 komoditas utama tanaman pangan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan pada tahun 2015 disebabkan karena iklim yang relatif cukup mendukung pertanaman, juga karena banyaknya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan baik APBD maupun APBN, antara lain berupa bantuan sarana produksi (benih dan pupuk), bantuan sosial kepada kelompok tani dalam bentuk Gerakan Peningkatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai, serta pembangunan jaringan irigasi.

Selain upaya teknis dalam peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, dilakukan pula kemitraan dengan TNI. Kerjasama ini telah dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dengan Kodam VII Wirabuana. Pemprov membantu dalam penyediaan sarana produksi benih dan pupuk melalui alokasi APBD, sedangkan TNI yang melaksanakan di lapangan dibantu oleh kelompok tani. Kerjasama ini diharapkan menjadi sarana penyuluhan untuk petani padi khususnya kedisiplinan dalam mengaplikasikan sarana produksi sehingga petani terbiasa dalam membudidayakan padi dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan antara lain adanya keterlambatan dropping benih dan pupuk, serangan OPT, terjadi pergeseran tanam di

beberapa wilayah karena musim hujan, daya tumbuh benih kedelai yang pendek, serta ketersediaan sarana produksi yang tidak tepat waktu.

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari dana APBD dan APBN. Pada tahun 2015 dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran Renstra dan Renja adalah sebesar Rp. 168.656.851.463,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 118.030.818.200,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 50.626.033.263,-

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, terdapat pula dukungan anggaran APBN melalui Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2015, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 1.501.806.712.000,-

Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran (Keuangan dan Fisik) APBD dan APBN Tahun 2015 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA			REALISASI BELANJA					
		Langsung	Tdk Langsung	Total	Langsung	(%)	Tdk Langsung	(%)	Total	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	50.626.033.263,00	50.626.033.263,00	0,00	0,00	49.416.381.819,00	97,61	49.416.381.819,00	97,61
II	BELANJA LANGSUNG	118.030.818.200,00	0,00	118.030.818.200,00	113.604.432.894,00	96,25	0,00	0,00	113.604.432.894,00	96,25
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	996.885.000,00	0,00	996.885.000,00	961.941.650,00	96,49	0,00	0,00	961.941.650,00	96,49
1.	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Keuangan	996.885.000,00	0,00	996.885.000,00	961.941.650,00	96,49	0,00	0,00	961.941.650,00	96,49
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	13.490.919.400,00	0,00	13.490.919.400,00	12.395.165.768,00	91,88	0,00	0,00	12.395.165.768,00	91,88
1.	Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Aparatur	1.191.934.000,00	0,00	1.191.934.000,00	798.298.400,00	66,98	0,00	0,00	798.298.400,00	66,98
2.	Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana SKPD / UPTD	8.547.894.400,00	0,00	8.547.894.400,00	8.324.783.913,00	97,39	0,00	0,00	8.324.783.913,00	97,39
3.	Peningkatan SDM Aparat Pertanian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3.751.091.000,00	0,00	3.751.091.000,00	3.272.083.455,00	87,23	0,00	0,00	3.272.083.455,00	87,23
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD	1.145.918.000,00	0,00	1.145.918.000,00	1.062.917.600,00	92,76	0,00	0,00	1.062.917.600,00	92,76
1.	Penyusunan Rancangan Program dan Monitoring Evaluasi Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1.145.918.000,00	0,00	1.145.918.000,00	1.062.917.600,00	92,76	0,00	0,00	1.062.917.600,00	92,76
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	30.331.040.000,00	0,00	30.331.040.000,00	29.417.871.100,00	96,99	0,00	0,00	29.417.871.100,00	96,99
1.	Kegiatan Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan	3.300.570.000,00	0,00	3.300.570.000,00	3.273.088.300,00	99,17	0,00	0,00	3.273.088.300,00	99,17
2	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi	15.405.910.000,00	0,00	15.405.910.000,00	15.056.834.000,00	97,73	0,00	0,00	15.056.834.000,00	97,73
3	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Sereal	9.368.860.000,00	0,00	9.368.860.000,00	8.865.583.100,00	94,63	0,00	0,00	8.865.583.100,00	94,63
4	Kegiatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Lainnya	2.255.700.000,00	0,00	2.255.700.000,00	2.222.365.700,00	98,52	0,00	0,00	2.222.365.700,00	98,52

Tabel 2. Realisasi Anggaran (Keuangan dan Fisik) APBD dan APBN Tahun 2015 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (lanjutan.....)

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA			REALISASI BELANJA					
		Langsung	Tdk Langsung	Total	Langsung	(%)	Tdk Langsung	(%)	Total	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI dan MUTU PRODUK HORTIKULTURA	31.108.853.200,00	0,00	31.108.853.200,00	30.171.152.750,00	96,99	0,00	0,00	30.171.152.750,00	96,99
1.	Kegiatan Perbanyak Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	2.330.955.000,00	0,00	2.330.955.000,00	2.283.378.800,00	97,96	0,00	97,96	2.283.378.800,00	97,96
2	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Pengembangan Tanaman Hias	3.415.155.200,00	0,00	3.415.155.200,00	3.304.419.998,00	96,76	0,00	0,00	3.304.419.998,00	96,76
3	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Serta Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka	4.539.206.000,00	0,00	4.539.206.000,00	4.076.755.600,00	89,81	0,00	0,00	4.076.755.600,00	89,81
4	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Serta Pengembangan Tanaman Buah-buahan	20.823.537.000,00	0,00	20.823.537.000,00	20.506.598.352,00	98,48	0,00	0,00	20.506.598.352,00	98,48
VI	PROGRAM PENGOLAHAN HASIL,PASCA PANEN,PENGEMBANGAN AGRIBISNIS dan PENYEBARAN INFORMASI	9.961.220.000,00	0,00	9.961.220.000,00	9.587.250.000,00	96,25	0,00	0,00	9.587.250.000,00	96,25
1.	Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.670.325.000,00	0,00	2.670.325.000,00	2.386.960.000,00	89,39	0,00	0,00	2.386.960.000,00	89,39
2.	Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Serta Penyebaran Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.941.050.000,00	0,00	3.941.050.000,00	3.910.953.600,00	99,24	0,00	0,00	3.910.953.600,00	99,24
3	Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis dan Pembiayaan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.349.845.000,00	0,00	3.349.845.000,00	3.289.336.400,00	98,19	0,00	0,00	3.289.336.400,00	98,19
VII	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	24.598.953.000,00	0,00	24.598.953.000,00	23.759.580.476,00	96,59	0,00	0,00	23.759.580.476,00	96,59
1.	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	7.066.600.000,00	0,00	7.066.600.000,00	6.892.715.300,00	97,54	0,00	0,00	6.892.715.300,00	97,54
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin Pertanian	9.400.818.000,00	0,00	9.400.818.000,00	9.041.226.201,00	96,17	0,00	0,00	9.041.226.201,00	96,17
3.	Kegiatan Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	8.131.535.000,00	0,00	8.131.535.000,00	7.825.638.975,00	96,24	0,00	0,00	7.825.638.975,00	96,24
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00
1	Kegiatan Regulasi Lahan Pangan Berkelanjutan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00
IX	PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU, PENGENDALIAN OPT, DAN STATISTIK PERTANIAN	6.197.029.600,00	0,00	6.197.029.600,00	6.048.553.550,00	97,60	0,00	0,00	6.048.553.550,00	97,60
1	Kegiatan Peramalan dan Pengendalian Serangan Tanaman (OPT) dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DP)	3.310.740.000,00	0,00	3.310.740.000,00	3.309.443.700,00	99,96	0,00	0,00	3.309.443.700,00	99,96
2	Kegiatan Pengembangan Pengawasan dan Pelayanan Sertifikasi Benih TP	1.894.220.000,00	0,00	1.894.220.000,00	1.819.368.150,00	96,05	0,00	0,00	1.819.368.150,00	96,05
3	Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Statistik Pertanian	992.069.600,00	0,00	992.069.600,00	919.741.700,00	92,71	0,00	0,00	919.741.700,00	92,71

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2013 – 2018, mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistem perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani dan penyuluh, ketahanan pangan, Nilai Tukar Petani (NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Permasalahan mendasar tersebut diuraikan sebagai berikut :

- ***Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan***

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan

petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

▪ ***Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air***

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

▪ **Status dan luas kepemilikan lahan**

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan

usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

▪ ***Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal***

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Surplus 2 juta ton beras dan produksi jagung 1,5 juta ton yang telah dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka system dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem

informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Saat ini infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan / perbibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

▪ ***Keterbatasan akses petani terhadap permodalan***

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan.

▪ ***Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh***

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah,

belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

▪ ***Masih rawannya ketahanan pangan***

Sulitnya memperoleh bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan iklim maupun serangan hama dan penyakit serta jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya beli petani terhadap pangan disebabkan oleh gagal panen atau anjloknya harga jual komoditas yang ditanam secara monokultur.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan dan pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan masyarakat serta pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.

▪ ***Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)***

Petani pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Meskipun hasil survey statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

▪ ***Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian***

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih.

▪ ***Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian***

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan dokumen rencana pembangunan Tahunan yang memuat rencana program dan kegiatan Tahunan serta sasaran dan alokasi pembiayaan yang sifatnya indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan.

RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2016 diarahkan untuk pencapaian sasaran program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018. **Visi** RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Sulawesi Selatan adalah **Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) **Misi**, yaitu :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional, dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Misi 2. Salah satu Tujuan pada Misi

2 adalah meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, Sasarannya adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, dan meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Selatan, maka titik berat pembangunan Tahun 2016 diarahkan pada upaya percepatan peningkatan posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan peluang pada setiap daerah Kabupaten/Kota. Posisi Sulawesi Selatan dalam koridor 4 nasional berfokus pada peningkatan produksi komoditi unggulan sektor pertanian, pengembangan industri utamanya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam membuka peluang kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan optimalisasi pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah dengan prinsip pemerataan yang berkeadilan,

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah untuk tahun 2016, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
2. Pengembangan kawasan strategis daerah;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, serta pembangunan kesehatan;
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

Dengan memperhatikan tantangan lingkungan eksternal dan internal maka **Tema** yang dicanangkan dalam RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah **Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dalam Upaya Pencapaian Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan**. Berdasarkan Tema tersebut diharapkan mengakselerasi pencapaian target terkait indikator makro, antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pendidikan, indeks kesehatan dan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka dapat dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Seluruh program yang direncanakan akan dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan pembangunan yang secara rasional dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Untuk efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran, maka usulan kegiatan SKPD disusun berdasarkan urutan skala prioritas dan setiap prioritas kegiatan merupakan kegiatan yang mendukung langsung upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan baik indikator sasaran dalam RKPD maupun indikator sasaran dalam masing-masing Renja-SKPD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dalam rangka perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura secara terpadu pada tahun 2016 baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Tahun 2015 guna menelaah usulan program dan kegiatan yang masuk dari masyarakat yang mendukung pencapaian sasaran strategis

pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara garis besar, pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2015 menyimpulkan sebagai berikut :

- Harapan Pemerintah terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyumbang pangan yang diperhitungkan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
- Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada dua tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.
- Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Program Pembangunan Pertanian dirumuskan dalam program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
- Pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka Pembangunan yang menyeluruh bagi masyarakat khususnya masyarakat petani. Pembangunan pertanian yang sustainable, terpadu, terintegrasi, sinergi. Pembangunan pertanian merupakan salah satu dari tujuan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang pertanian pemerintah (pusat maupun daerah) telah melakukan berbagai hal dan melalui sistem yang terpadu dan sinergi.

- Pembangunan sumberdaya air di Sulawesi Selatan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung program pengembangan pertanian secara menyeluruh, antara lain pengembangan tanaman pangan dan hortikultura melalui perbaikan jaringan irigasi yang dapat mensuplay air pertanian.
- Kebijakan pengembangan penyuluhan di Sulawesi Selatan pada TA. 2016 diantaranya adalah: a) pengembangan penyuluh polivalen di tingkat lapangan dan penyuluh spesialis di tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat untuk mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian; b) peningkatan fungsi dan peran penyuluh pertanian, dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian; c) pemantapan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; d) peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM penyuluh, masyarakat pelaku utama dan keluarganya; e) pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama di semua tingkatan wilayah administratif.
- Program strategis pembangunan ketahanan pangan daerah pada TA. 2016 di Sulawesi Selatan adalah untuk : a) meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; b) menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman , bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g) meningkatkan kesejahteraan bagi petani,

nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan; h) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan melakukan hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup Sektor Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon 1 terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 adalah ***Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.***

Adapun Misi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2015 – 2019 yaitu:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi .

Selain Visi dan Misi, dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, termuat pula Tujuan Pembangunan Pertanian selama kurun waktu 5 tahun (2015 -2019), yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 – 2019:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Visi pembangunan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 adalah **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (**Nawa Cita**). Agenda prioritas di bidang pertanian dalam NAWA CITA terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari Agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :
 - a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
 - b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
 - c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada (i) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditas andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (ii) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

2. Peningkatan Kedaulatan Pangan, adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan
 - a. ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri;
 - b. pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan

- c. mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Selanjutnya dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi :

- i. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai, dan bawang merah.
- ii. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- iii. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.
- iv. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- v. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

- 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
- 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
- 3. Pengembangan dan perluasan logistic benih/bibit
- 4. Penguatan kelembagaan petani
- 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
- 6. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi
- 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 di sektor pertanian adalah peningkatan produksi pangan, yaitu:

- a) Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan bagi swasembada pangan daerah, kedaulatan pangan nasional, dan ekspor produk pertanian;
- b) Mempercepat transformasi agribisnis ke agroindustri bagi berkembangnya klaster industri daerah;
- c) Menginisiasi pengembangan industri pertanian/industrialisasi pedesaan dan pengembangan pertambangan.

Mengacu pada arah kebijakan tersebut, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 di sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dengan indikator sasaran Meningkatkan Produksi Padi mencapai 5.997.755 ton dan Produktivitas Padi 54,37 Kw/Ha serta Meningkatkan Produksi Jagung di atas 1,5 juta ton.

Sesuai dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pada RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, maka **Tujuan** pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan swasembada berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan produksi dan mutu produk hortikultura.
- 3. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian unggulan tanaman pangan dan hortikultura.
- 4. Penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur.

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah :

1. Peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
2. Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan teknologi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian melalui peningkatan penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitasi pemenuhan kebutuhan pupuk dan pestisida, serta penyediaan dan perbaikan infrastruktur tingkat usaha tani.
4. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan usaha tani berbasis keseimbangan ekosistem dan kearifan lokal.
5. Peningkatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja, SDM, dan prasarana pertanian.

Berdasarkan **Sasaran Strategis** tersebut maka target capaian tahun 2016 meliputi peningkatan luas panen, produktivitas, dan produksi komoditi utama tanaman pangan dan hortikultura yang diuraikan sebagaimana Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Kenaikan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No.	Komoditi	Kenaikan (%)		
		Luas Panen	Produktivitas	Produksi
1	Padi	4,00	2,00	6,00
2	Jagung	5,00	1,50	6,50
3	Kedelai	3,50	1,50	5,00
4	Kacang Tanah	0,75	0,25	1,00
5	Kacang Hijau	0,75	0,25	1,00
6	Ubikayu	1,00	0,50	1,50
7	Ubijalar	1,00	0,50	1,50
8	Cabe Besar	0,50	0,50	1,00
9	Cabe Rawit	0,50	0,50	1,00
10	Bawang Merah	0,50	0,50	1,00
11	Kentang	0,50	0,50	1,00
12	Tomat	0,50	0,50	1,00
13	Mangga	0,50	0,50	1,00
14	Jeruk Manis	0,50	0,50	1,00
15	Jeruk Besar	0,50	0,50	1,00
16	Pisang	0,50	0,50	1,00
17	Markisa	0,50	0,50	1,00

Dengan sasaran kenaikan luas panen, produktivitas, dan produksi sebagaimana pada Tabel 3, maka ditetapkan Sasaran Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No.	Komoditi	Sasaran Tahun 2016		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw /Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	1.103.137	54,37	5.997.755
2.	Jagung	308.515	48,95	1.510.182
3.	Kedelai	34.258	15,44	52.895
4.	Kacang Tanah	24.453	11,85	28.977
5.	Kacang Hijau	18.184	13,33	24.239
6.	Ubikayu	27.576	221,52	610.861
7.	Ubijalar	5.527	142,27	78.639
8.	Cabe Besar	3.994	58,83	23.497
9.	Cabe Rawit	4.407	48,82	21.513
10.	Bawang Merah	4.609	93,11	42.913
11.	Kentang	1.853	131,69	24.396
12.	Tomat	4.653	104,12	48.446
13.	Mangga	1.692.978	97,12	164.422
14.	Jeruk Manis	322.036	47,15	15.184
15.	Jeruk Besar	210.175	155,77	32.739
16.	Pisang	3.164.926	49,01	155.113
17.	Markisa	435.547	29,06	12.657
Keterangan :				
- Luas Panen Mangga, Jeruk, dan Markisa dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan (pohon)				
- Luas Panen Pisang dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan (rumpun)				
- Produktivitas Mangga, Jeruk, dan Markisa dinyatakan dalam kg/pohon				
- Produktivitas Pisang dinyatakan dalam kg/rumpun				

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, maka rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan :

- a) Pembinaan dan Peningkatan Penatausahaan Administrasi Keuangan

Indikator kinerja :

- Penataan administrasi keuangan yang akuntabel setiap tahun.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Terdiri dari kegiatan :

- a) Pengembangan Prasarana dan Sarana Aparatur

Indikator kinerja :

- Terlaksananya pengadaan bahan/material untuk laboratorium, pengadaan perlengkapan kantor, serta monitoring pengadaan barang di UPTD selama 1 tahun.

- b) Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana SKPD / UPTD.

Indikator kinerja :

- Terlaksananya pembangunan dan rehab bangunan SKPD dan UPTD, perbaikan jaringan dan instalasi, desain serta pengawasan pembangunan/rehab bangunan SKPD/UPTD.

- c) Peningkatan SDM Aparat Pertanian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja :

- Terlaksananya penataan administrasi perkantoran, SDM dan pengelolaan administrasi kepegawaian setiap tahun.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Terdiri dari kegiatan :

- a) Penyusunan Rancangan Program dan Monitoring Evaluasi Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja:

- Terlaksananya forum SKPD, tersedia dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, ROPAK), evaluasi, dan pelaporan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (Lakip/Sakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan), serta pelatihan petugas.

4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Terdiri dari kegiatan :

- a) Perbanyak Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan

Indikator kinerja:

- Terlaksananya perbanyak benih padi, jagung, dan kedelai bersertifikat yang siap diperbanyak pada instalasi kebun benih (IKB) dan penangkar benih.

- b) Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi

Indikator kinerja:

- Produksi Padi meningkat 6% per tahun dan produktivitas meningkat 2,0% per tahun.
- Tersusunnya paket rekomendasi, terlaksananya pelatihan dan sosialisasi teknologi padi, pertemuan koordinasi, demfarm, penyediaan benih Padi gratis, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

- c) Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Sereal Lain

Indikator kinerja:

- Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun dan Produktivitas meningkat 1,5% per tahun.
- Sosialisasi peningkatan produksi jagung, koordinasi, adopsi teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, demfarm jagung, penyediaan benih/bibit jagung gratis.

d) Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian Lainnya

Indikator kinerja:

- Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun dan Produktivitas meningkat 1,5% per tahun.
- Akselerasi pengembangan dan peningkatan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian (Kabi), sosialisasi pengembangan Kabi, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitasi penyediaan benih/bibit gratis kedelai, kacang hijau, dan ubikayu.

5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura

Terdiri dari kegiatan :

a) Perbanyak Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Tersedia bibit hortikultura bermutu yang bersertifikat yang siap diperbanyak pada instalasi kebun benih (IKB) hortikultura dan penangkar, pelatihan perbanyak tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias.

b) Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Tanaman Hias

Indikator kinerja:

- Produksi tanaman hias meningkat 5% setiap tahun.

- Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan tanaman hias, bimbingan teknis, koordinasi, pengelolaan greenhouse, serta promosi dan display tanaman hias dalam rangka peningkatan ekspor.

c) Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka

Indikator kinerja:

- Produksi sayuran dan biofarmaka meningkat 1% per tahun dan produktivitas sayuran dan biofarmaka meningkat 0,5% per tahun.
- Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan sayuran dan biofarmaka, pengembangan SDM, kajian pengembangan sayuran, bantuan benih/bibit sayuran gratis.

d) Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Buah-buahan

Indikator kinerja:

- Produksi buah-buahan meningkat 1% per tahun dan produktivitas buah-buahan meningkat 0,5% per tahun.
- Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan tanaman buah, registrasi kebun buah, bantuan bibit buah-buahan gratis.
- Peningkatan kompetensi petugas, adopsi teknologi pengembangan buah-buahan, serta studi banding.

6. Program Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengembangan Agribisnis, dan Penyebaran Informasi

Terdiri dari kegiatan :

a) Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Tingkat kehilangan hasil Padi dan Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun.

- Survey susut hasil, pertemuan koordinasi, bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil, sosialisasi dan pelatihan pengolahan hasil dan pasca panen.
- Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif.

b) Pengembangan Pemasaran serta Penyebaran Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun.
- Meningkatnya pemasaran hasil-hasil pertanian melalui promosi dan pameran produk unggulan dan jaringan distribusi beras antar pulau.
- Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, promosi dan pameran, pertemuan koordinasi, akselerasi ekspor tanaman pangan dan hortikultura, pasar tani, fasilitasi system informasi pasar, serta fasilitasi pemasaran beras antar pulau.

c) Pengembangan Usaha Agribisnis dan Pembiayaan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Fasilitasi kemitraan usaha bagi petani dan bimbingan pengembangan usaha sebanyak 3 kali, yaitu fasilitasi kemitraan dan bimbingan pengembangan usaha tanaman pangan hortikultura, dan pengolahan hasil.
- Fasilitasi pelaksanaan tudang sipulung, kemitraan usaha, bimbingan penyusunan proposal pembiayaan usaha tani, pertemuan koordinasi, pemberdayaan wanita tani, serta fasilitasi sanggar tani.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan :

a) Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air

Indikator kinerja:

- Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani meningkat 5% per tahun.
- Pemberdayaan kelembagaan petani, pembangunan jalan tani dan jaringan irigasi, penyediaan dan perbaikan infrastruktur, pelaksanaan lomba P3A dan GP3A.

b) Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin Pertanian

Indikator kinerja:

- Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun.
- Pemberdayaan kelembagaan UPJA menjadi kelompok pemula, berkembang, dan profesional.
- Workshop alat dan mesin pertanian, pengawalan, pertemuan koordinasi, lomba UPJA berprestasi.

c) Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida

Indikator kinerja:

- Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun.
- Meningkatnya kinerja KP3 dan PPNS
- Pengawasan pupuk dan pestisida, koordinasi KP3 dan PPNS.

8. Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan

Terdiri dari kegiatan :

a) Regulasi Lahan Pangan Berkelanjutan

Indikator kinerja :

- Sosialisasi UU No. 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Berkelanjutan.

9. Program Penyediaan Benih Bermutu, Pengendalian OPT, dan Statistik Pertanian

Terdiri dari kegiatan :

- a) Peramalan dan Pengendalian Serangan OPT dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Indikator kinerja:

- Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) menurun 0,2% per tahun.
- Pertemuan koordinasi, gerakan pengendalian OPT, bimbingan teknis, pengelolaan laboratorium dan brigade proteksi tanaman.

- b) Pengembangan Pengawasan dan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Persentase penggunaan benih Padi bersertifikat meningkat 1,5% setiap tahun.
- Sosialisasi penerapan SNI, pelatihan penilaian varietas, forum koordinasi dan komunikasi perbenihan, pelatihan dan sosialisasi perbenihan, pemasyarakatan penggunaan benih bermutu.

- c) Pelayanan Data dan Informasi Statistik Pertanian

Indikator kinerja:

- Kualitas pelayanan data dan informasi statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura meningkat 5% setiap tahun.
- Pengelolaan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura, laporan pelaksanaan statistik pertanian, pertemuan koordinasi perstatistikan.

10. Program Fasilitas Prasarana dan Sarana Berbantuan

Terdiri dari kegiatan :

- a) Fasilitas Prasarana dan Sarana Berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Indikator kinerja :

- Fasilitasi sarana dan prasarana berbantuan Dana Alokasi Khusus berupa pembangunan dan rehab kantor UPTD BTPH serta Instalasi Kebun Benih.

b) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Berbantuan Loan WISMP

Indikator kinerja :

- Fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan berbantuan Loan WISMP.

Rancangan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 beserta perubahan anggarannya dijabarkan pada Tabel 5.

3.4. Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian

Pemerintah Pusat memberikan dukungan terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain melalui Kementerian Pertanian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk tahun 2016 memberikan dukungan antara lain melalui bantuan anggaran APBN Tahun 2016 dalam bentuk Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP). Anggaran tersebut diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui Eselon 1 terkait kepada unit-unit Satuan Kerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Program dan Kegiatan yang mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN tersebut adalah Program dan Kegiatan yang mengacu pada Renstra dan Renja Kementerian Pertanian.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan. Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

- d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
 - e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
2. Direktorat Jenderal Hortikultura
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan. Terdiri dari kegiatan :
- a. Budidaya dan Pasca Panen Buah
 - b. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
 - c. Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat
 - d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
 - e. Pengembangan Perlindungan Tanaman Hortikultura
 - f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Terdiri dari kegiatan :
- a. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - b. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
 - d. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selanjutnya rincian rencana program dan kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2016 dalam mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada Lampiran.

4

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2016 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 dapat tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2016. Kekurang-kekurangan yang dijumpai

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan dan masalah serta kendala yang dihadapi akan ditindaklanjuti dan dicarikan solusi pemecahannya.

LAMPIRAN